

## DAFTAR PUSTAKA

Gunadi. 2007. Pajak Internasional. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Hansen and Mowen. 1996. *Management Accounting*. Cincinnati, Ohio: Western College Publishing

Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 7 (Revisi 2010), Tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Jakarta: IAI

Mangoting, Yenni. 2000. Jurnal Akuntansi dan Keuangan “Aspek Perpajakan Dalam Praktek Transfer Pricing”

Organisation for Economic Co-Operation and Development. *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*. OECD, 2010.

Republik Indonesia. 2008. Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-22/PJ/2011 entang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [PER-43/PJ/2010](#) Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak

Republik Indonesia. 2013. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-50/PJ/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak

Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 77 Tahun 2013 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak